



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Memberikan :

PENGHARGAAN

Kepada :

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI

atas prestasinya dalam :

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

dengan predikat nilai



Jakarta, 06 Desember 2022

Menteri

**Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi**



ABDULLAH AZWAR ANAS

Nomor : B/ 1111 /AA.05/2022

6 Desember 2022

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai

di

Ruteng

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Manggarai, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Manggarai. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada tingkat pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah (PD).

Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/rencana strategis (renstra) 2021-2026 dan telah menetapkan 1 Visi, 4 Misi, 9 Tujuan, 13 Indikator tujuan, 37 Sasaran dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2021;
- b. Menyusun penjenjangan kinerja meskipun belum sepenuhnya mengacu ke Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021;
- c. Memetakan *crosscutting* antar PD dalam mengawal program prioritas daerah.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai menunjukkan nilai sebesar **63,90** dengan predikat "**B**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Baik**", yaitu implementasi **AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,41
2.	Pengukuran Kinerja	30	16,99
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,05
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,45
	Nilai Hasil Evaluasi	100	63,90
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Hasil evaluasi tahun 2022 "**tidak diperbandingkan**" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih

menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada tingkat pemerintah daerah maupun tingkat PD.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2022 sebagai berikut:

A. Perencanaan kinerja

Pemerintah Kabupaten Manggarai telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPJMD 2021-2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam renstra dan perjanjian kinerja dan dokumen lainnya baik pada tingkat PD. Selama tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Manggarai telah menyusun *cascading* kinerja dan rencana aksi dengan target triwulan sebagai pedoman pelaksanaan kinerja. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas perencanaan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- 1) Penetapan target perencanaan pada PK 2022 belum memanfaatkan analisa atas pencapaian target kinerja sebelumnya, sehingga masih ditemukan target kinerja yang *under value* dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya;
- 2) Penjenjangan kinerja yang telah disusun belum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021, yaitu belum sepenuhnya mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor* (CSF) atas pencapaian kinerja. Hal ini menyebabkan penjenjangan kinerja tersebut belum memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat, serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi;
- 3) Penetapan program dan kegiatan belum sepenuhnya berfokus pada pencapaian sasaran strategis, sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas.

B. Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Manggarai dan perangkat daerahnya telah melakukan pengukuran secara berkala dalam periode triwulanan atas realisasi kinerja dengan mengacu pada rencana aksi yang telah disusun dan sebagian kecil PD sudah melaporkan di dalam ESR. Untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja tersebut telah disusun pedoman pengukuran kinerja melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) di tingkat pemerintah daerah dan PD.

Pengumpulan data kinerja pada sebagian kecil PD sudah didukung dengan SOP Pengumpulan Data Kinerja. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pengukuran kinerja diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja masih dilakukan secara manual dan dalam proses pembangunan pengembangan aplikasi manajemen kinerja;
- 2) Dalam melakukan pengukuran kinerja, masih ditemukan Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah kabupaten dan PD yang belum disertai definisi operasional dan formula perhitungannya;
- 3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pada beberapa PD masih berorientasi pada penyerapan anggaran belum pada pencapaian kinerja secara keseluruhan untuk dapat mengetahui ketercapaian dan kendala yang dihadapi;
- 4) Beberapa perangkat daerah sasaran dan indikator sudah cukup bagus dan berkinerja namun perlu dilihat lagi kecukupan dari indikator kerjanya untuk mencapai sasaran yang sudah ditargetkan;
- 5) SOP pengumpulan data kinerja hanya berlaku pada sebagian kecil PD dan belum secara menyeluruh menjadi kebijakan yang mengikat pada seluruh PD;
- 6) Belum seluruh PD melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas penerapan rencana aksi.

C. Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Manggarai telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2021 untuk tingkat pemerintah daerah dan laporan akuntabilitas kinerja untuk tingkat PD. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah dijanjikan serta sudah dipublikasi secara umum melalui *website* pemerintah daerah. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pelaporan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- 1) Laporan kinerja pada tingkat PD belum cukup menyampaikan informasi yang memadai diantaranya tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
- 2) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Pemerintah Kabupaten Manggarai telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh PD. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan evaluasi internal tahun 2021 belum memiliki pedoman evaluasi internal sehingga belum berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- 2) Kualitas evaluasi internal perlu ditingkatkan terutama dalam memberi rekomendasi yang seharusnya dilakukan pada seluruh area;
- 3) Seluruh PD belum seluruhnya menindaklanjuti hasil evaluasi yang disampaikan oleh inspektorat;
- 4) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja *output* dan *outcome* pada tingkat pusat;
- 5) Belum ada kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi AKIP internal ini sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Memastikan kualitas dan kecukupan indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) terutama pada kriteria spesifik, relevansi, dan terukur;
- b. Melakukan reviu dan perbaikan untuk memastikan kualitas *cascading* (penjenjangan) kinerja dari tingkat tertinggi hingga terendah dapat berorientasi *outcome* (hasil) sesuai dengan tingkatnya dengan memerhatikan *logical framework* dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan efisien;
- c. Memanfaatkan analisa atas pencapaian target kinerja sebelumnya untuk menentukan target kinerja selanjutnya. Hal ini bertujuan agar target kinerja yang ditetapkan dapat memenuhi kriteria relevan dan *achievable* serta dapat menjadi saran dan masukan pengambilan kebijakan untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya;
- d. Mengembangkan sistem informasi pengelolaan manajemen kinerja terintegrasi antara organisasi dan individu secara berjenjang dari tingkat tertinggi hingga terendah dan memanfaatkannya dalam proses pemantauan dan selanjutnya bisa dijadikan dasar untuk pemberian *reward and punishment*;

- e. Mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara berkala dan sistematis dengan berfokus tidak hanya pada anggaran, namun juga pada kinerja. Hal ini bertujuan sehingga ketercapaian kinerja dapat dipantau, dan menjaga konsistensi antara perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja;
- f. Mendorong seluruh unit organisasi untuk dapat menerapkan kebijakan pengumpulan data kinerja secara berkala dan melaporkan hasil data kinerja tersebut sebagai review atas pencapaian kinerja;
- g. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan analisis yang lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi atas capaian kinerja. Terutama pada analisis deskriptif untuk mengukur efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dan kondisi *benchmark* dari Kabupaten/Kota lain serta Provinsi, dan apabila memungkinkan dengan Nasional untuk kinerja yang sifatnya strategis;
- h. Menyusun pedoman pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- i. Mendorong seluruh PD yang ada untuk dapat menindaklanjuti hasil evaluasi internal yang telah dilakukan oleh inspektorat melalui penyusunan rencana tindak lanjut sebagai media dalam melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**
Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
4. Bupati Manggarai.